

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI (SE)
Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh**

Oleh:

**NAJIBA MAISURA
NPM.2002110005**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 Januari 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NAJIBA MAISURA
NPM : 2002110005

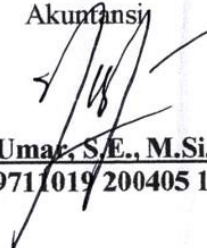
Dengan judul:

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

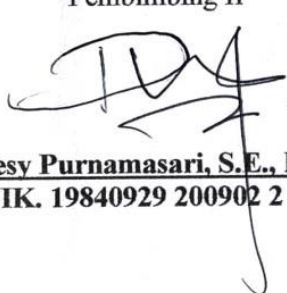
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Svamsidar, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II


Desy Purnamasari, S.E., M.Si
NIK. 19840929 200902 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Tarzan Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 Januari 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NAJIBA MAISURA
NPM : 2002110005

Dengan judul:

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 10 Januari 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Desy Purnamasari, S.E., M.Si
NIK. 19840929 200902 2 001

Anggota

H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Najiba Maisura
NPM : 2002110005
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Najiba
Najiba Maisura

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 19 Januari 2024

Yang Menyatakan



Najiba Maisura

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak CA., Selaku ketua Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak., dan Ibu Desy Purnamasari, SE, M.Si., selaku pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan hingga selesainya penelitian ini.
5. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si., selaku ketua Laboratorium Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Dan kepada teman - teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendakNya,

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Najiba Maisura

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Akuntabilitas Keuangan	9
2.1.2 Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	12
2.1.3 Aktivitas Pengendalian.....	18
2.2 Penelitian Sebelumnya	20
2.3 Kerangka Penelitian	25
2.3.1 Hubungan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Keuangan	25
2.3.2 Hubungan Aktivitas Pengendalian dengan Akuntabilitas Keuangan.....	26
2.4 Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.1.1 Sifat Studi	28
3.1.2 Jenis Investigasi	28
3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti	29
3.1.4 Situasi Studi	29
3.1.5 Unit Analisis	29
3.1.6 Horizon Waktu.....	30
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	30
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.4 Definisi dan Operasioanalisis Variabel.....	33
3.5 Teknik Analisis Data	34
3.6 Pengujian Data	35
3.6.1 Uji Reliabilitas	35
3.6.2 Uji Validitas	36
3.7 Pengujian Hipotesis	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1 Profil Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.....	39
4.1.2 Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	40
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.....	41
4.2 Karakteristik Responden	41
4.3 Hasil Pengujian Data.....	44
4.3.1 Uji Validitas Instrumen	44
4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	45
4.4 Analisis Deskriptif	46
4.4.1 Variabel Akuntabilitas Keuangan.....	47
4.4.2 Variabel Sistem akuntansi keuangan daerah	48
4.4.3 Variabel Aktivitas pengendalian	50
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	51
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	53
4.6.1 Hasil Pengujian Secara Bermasa-Sama dan Parsial	53
4.6.2 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	54
4.6.3 Pembahasan	55
4.6.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan	55
4.6.3.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan	57
4.6.3.3 Pengaruh Aktivitas pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh Berdasarkan Jabatan.....	32
Tabel 3.2 Skala Pengukuran.....	33
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	45
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)	46
Tabel 4.4 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Keuangan	47
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	48
Tabel 4.6 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Aktivitas Pengendalian.....	49
Tabel 4.7 Pengaruh variabel bebas terhadap Akuntabilitas Keuangan	52
Tabel 4.8 Model Summury	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	27

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PROVINSI ACEH**

**NAJIBA MAISURA
NPM.2002110005**

Pembimbing I : Syamsidar, SE, M.Si, Ak
Pembimbing II : Desy Purnamasari, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh secara simultan dan secara parsial. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 79 pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh baik secara simultan maupun secara parsial. Hal ini disebabkan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh yang baik.

Kata kunci: *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aktivitas Pengendalian, Akuntabilitas Keuangan*

*THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS AND
CONTROL ACTIVITIES ON FINANCIAL ACCOUNTABILITY IN
MANAGEMENT AGENCY ACEH PROVINCE FINANCE*

*NAJIBA MAISURA
NPM.2002110005*

*Supervisor I : Syamsidar, SE, M.Si, Ak
Supervisor II : Desy Purnamasari, SE, M.Si*

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of the regional financial accounting system and control activities on financial accountability at the Aceh Province Financial Management Agency simultaneously and partially. The sample in this study was 79 employees at the Aceh Province Financial Management Agency. The research method used is a quantitative method. This research uses multiple linear regression data analysis techniques. The research results show that simultaneously and partially the regional financial accounting system and control activities influence financial accountability at the Aceh Province Financial Management Agency. The conclusion in this research is that the regional financial accounting system and control activities influence financial accountability at the Aceh Province Financial Management Agency both simultaneously and partially. This is because the regional financial accounting system and control activities function as one unit in realizing good financial accountability of the Aceh Provincial Financial Management Agency.

*.
Keywords: Regional Financial Accounting System, Control Activities, Financial Accountability*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan dunia ekonomi saat ini peranan akuntansi sangat penting untuk memutuskan sesuatu agar dalam menjalankan kegiatan tidak menimbulkan kerugian. Kegiatan yang dilakukan oleh akuntansi dalam kegiatan ekonomi mencakup kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, perusahaan, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi menghasilkan laporan berbentuk data transaksi bisnis yang diolah dan disajikan menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkannya.

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks. Terkait reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa keuangan yang lebih adil, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya

perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabilitas. Salah satu cara dengan penyempurnaan sistem akuntansi pemerintahan secara menyeluruh dengan menerbitkan peraturan perundangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan terutama untuk organisasi privat atau swasta, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi

masuk dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Membangun sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintahan Daerah merupakan salah satu solusi Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh untuk mengelola keuangan, baik transaksi yang berkaitan dengan anggaran, operasi maupun aset, kewajiban dan ekuitas, sehingga pada akhir periode dapat dihasilkan laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan ini juga diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diaudit (*auditable*) sehingga memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan. Tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi salah satu alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat.

Selain itu juga diperlukan aktivitas pengendalian, sebagai contoh pengendalian terhadap pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut harus sering dievaluasi, misalnya dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan. Prinsip pengendalian internal yang baik sebaiknya jangan ada suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dilaksanakan oleh satu orang.

Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Atas hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh harus memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang handal. Jika sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang dimiliki masih belum mencapai target, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang handal. Oleh karena itu, dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh seharusnya sudah mulai memikirkan investasi untuk pembangunan sistem akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dan meningkatkan aktivitas pengendalian yang lebih baik. Realisasi anggaran penggunaan sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Penggunaan Sumber Daya pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh

Tahun	Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	Persentase
2020	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Peningkatan Pendapatan Aceh	21.844.688.713	16.136.743.430	74%
2021	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Peningkatan Pendapatan Aceh	17.329.216.412	11.095.423.099	64,03%
2022	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Peningkatan Pendapatan Aceh	20.206.317.727	17.121.452.114	84,73%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 74% atau sebesar Rp.16.136.743.430 dari Rp. 21.844.688.713, yang berarti sisa anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp.5.707.945.282. Pada tahun 2021 sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator sebesar 64,03% atau sebesar Rp 11.095.423.009 dari Rp 17.329.216.412 yang berarti ada anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 6.233.793.313. Pada tahun 2022 sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 84,73% atau sebesar Rp 17.121.452.114, dari Rp 20.206.317.727, yang berarti ada anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 3.084.865.613.

Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief No.219 Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23114. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah berupaya seoptimal mungkin mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai tuntutan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk menyukseskan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan prioritas utama yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang terjadi berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh pada tahun 2021 bahwa terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian sasaran Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh yaitu kurangnya sumber daya manusia/pegawai

secara kualitas dan kuantitas khususnya bagian IT dalam menunjang peningkatan pelayanan dalam pengoptimalisasi realisasi pendapatan. Kemudian sarana dan Prasarana yang belum memadai terkait tercapainya kinerja, proses pengadaan yang mengalami perubahan ketentuan sehingga menyulitkan tercapainya realisasi kegiatan di awal tahun. (<https://bpka.acehprov.go.id/>).

Berdasarkan permasalahan di atas maka yang berhubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas keuangan yaitu masalah tentang sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang rendah maka dapat berdampak pada kemampuan aparatur dalam menguasai sistem akuntansi dan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas keuangan. Saat ini berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia/pegawai dengan memberikan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia/pegawai secara kuantitas sumber daya manusia/pegawai dapat ditingkatkan melalui penerimaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang peningkatan optimalisasi penerimaan pendapatan Aceh.

Berdasarkan uraian dan fenomena masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
3. Apakah aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
2. Mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
3. Mengetahui pengaruh aktivitas pengendalian secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, sumbangan sekaligus referensi bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan secara teoritis yang berkaitan dengan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan.

2. Manfaat Secara Praktis.

- a. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi, acuan dan masukan bagi pihak pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
- b. Bagi peneliti lain sebagai gambaran dan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama, yaitu pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian dalam akuntansi keuangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan keterbatasan waktu, keterbatasan biaya dan keterbatasan pengetahuan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian untuk menilai akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas Keuangan

Dalam konteks sektor publik, akuntansi harus dianggap sebagai informasi manajemen keuangan dan sistem pelaporan untuk penggunaan pemerintah dan manajemen, parlemen dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Menurut Mardiasmo (2018:18) menyatakan akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi (2019:1) menyatakan akuntansi publik adalah seni (keterampilan) dan ilmu mengolah transaksi atau kejadian yang setidaknya-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan atas pemerintah yang nantinya akan digunakan didalam proses pengambilan keputusan public.

Menurut Bastian (2019:385) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kemudian menurut Ghartey (2019:308) tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta

membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Halim (2018:18) mendefinisikan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk mengelola keuangan (desentralisasi), telah menunjukkan pelaporan keuangan menjadi pengendali dalam mewujudkan akuntabilitas publik, dan kualitas laporan keuangan serta manajemen.

Menurut Mardiasmo (2018:19), akuntabilitas dibagi menjadi 2, adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Vertikal
Akuntabilitas vertikal merupakan suatu pertanggungjawaban segala aktivitas yang telah dilakukan kepada tingkatan yang lebih tinggi.
- b. Akuntabilitas Horizontal
Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan yang tingkatannya sejajar. Tingkatan akuntabilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu:
 1. *Accountability For Probability and Legality*
Accountability For probability berkaitan dengan penghindaran terhadap kejahatan jabatan khususnya untuk meyakinkan bahwa dana telah digunakan dengan benar dan dengan cara yang benar. Sementara *Accountability for legality* menekankan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tidak melampaui batas.
 2. *Process Accountability*
Berkaitan dengan apakah terdapat prosedur-prosedur yang memadai yang diterapkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu, serta usaha untuk meyakinkan apakah aktivitas tertentu dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 3. *Performance Accountability*
Menekankan pada kinerja dari suatu entitas yang disampaikan kepada publik.
 4. *Programme Accountability*
Menekankan pada program dari suatu entitas yang disampaikan pada publik.

5. *Policy Accountability*

Menekankan pada kebijakan dari suatu entitas yang disampaikan kepada publik.

Menurut Mulyadi (2019:42) akuntabilitas merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Mulyadi (2019:42) akuntabilitas terdapat tiga indikator yaitu : motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial. Yang juga akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. Motivasi

Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jika dikaitkan dengan dunia kerja motivasi merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah, dan ketekunan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

2. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi

3. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan

melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut. Maka ia akan merasa berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan profesinya tersebut dengan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengaturan pengelolaan anggaran yang dapat mengacu pada ketentuan perundang-undangan pada UU Nomor 71 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menjelaskan bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Ketentuan perundang-undangan tersebut secara limitatif telah menjelaskan siklus pengelolaan keuangan Negara/daerah yang dimulai dari: Perencanaan, Pembahasan, Pengesahan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut Rasdianto (2017:6) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Rahayu, 2017:2). Penerapan Sistem Akuntansi Daerah berdasarkan standart akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola

keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertang-gungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan *International Accounting Standards Board* (IASB) yang sekarang disebut dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat menghasilkan laporan keuangan denga mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik (Defitri, 2018:68).

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No. 17, 2003). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006). Menurut Halim (2018:94) mengatakan bahwa: “Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset”

Oleh karena itu anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah haruslah dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena bagaimanapun pemerintah merupakan pelayan masyarakat, hal ini disebabkan oleh peran penting dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat merupakan tujuan penting dari keberadaan organisasi pemerintah (Siswadhi, 2017). Dengan demikian pemerintah ataupun pemerintah daerah harus dapat merencanakan dan menyelenggarakan program-program kerja yang tujuan akhirnya adalah menciptakan kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat (Herawati, 2017).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Defitri, 2018:68) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga hasil penelitian Wati dkk (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2017) yang memberikan informasi bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian jika sistem keuangan daerah diterapkan dengan baik dari awal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin lebih baik.

Romney (2019:3) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari lima komponen:

1. Orang-orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data, tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. *Software*, yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Romney (2019:12) menyatakan bahwa terdapat delapan unsur dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu :

- 1) Tujuan
Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang menggambarkan tenaga penggerak dibelakang sistem dan tujuan nya.
- 2) Masukan
Data harus dikumpul dan dimasuk kan sebagai input dalam sistem. Masukan yang umum dari suatu sistem informasi akuntansi adalah data transaksi dan jurnal.
- 3) Keluaran
Informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut keluaran. Keluaran yang umum dari SIA adalah laporan keuangan dan laporan-laporan internal seperti daftar piutang dagang, anggaran, dan proyeksi cashflow.
- 4) Penyimpanan data
Data disimpan dalam sistem informasi akuntansi untuk pemakaian berikutnya. Data yang disimpan harus diperbaharui secara teratur.
- 5) Pengolahan
Data harus diolah untuk menghasilkan informasi. Sebagian organisasi memproses data menggunakan komputer.
- 6) Instruksi dan prosedur
Sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur secara rinci. Instruksi dan prosedur untuk pemakai biasanya terdapat pada prosedur manual.
- 7) Pengguna
Orang-orang yang berhubungan dengan sistem dan pemakai informasi yang dihasilkan disebut pengguna yang meliputi semua orang yang melaksanakan dan mencatat semua transaksi serta semua orang yang mengatur dan mengendalikan sistem.

8) Pengendalian dan pengukuran konsumen

Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem harus akurat, bebas dari kesalahan dan dilindungi dari akses-akses yang tidak sah. Pengendalian dan pengukuran konsumen dibuat dalam suatu sistem informasi akuntansi untuk menjamin informasi yang akurat dan pengoperasian sistem secara tepat.

Menurut Sholeh (2017;10) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. *Value for money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai.

Menurut Halim (2018:94) indikator untuk mengukur sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian
Tahap ini merupakan tahap yang paling pertama dari tahapan siklus akuntansi yakni dengan cara mengidentifikasi transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan menangkap peristiwa yang memenuhi syarat sebagai transaksi
2. Pengukuran
Pengukuran merupakan salah satu fungsi penting dan krusial di akuntansi. Pengukuran yang tidak tepat ataupun tidak akurat akan menghasilkan informasi keuangan yang salah atau tidak tepat.
3. Pencatatan
Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
4. Pelaporan
Setelah semua proses selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

2.1.3 Aktivitas Pengendalian

Istilah pengendalian berasal dari bahasa inggris yaitu “*control*” adalah merupakan salah satu fungsi terpenting dari akuntansi. Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan (Mardiasmo,2018:76). Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efesien. Manajemen adalah mengenai motivasi, organisasi dan memimpin suatu tim yang terdiri dari

orang-orang dengan aktivitas untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Aktivitas Pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur untuk melakukan kegiatan, mengidentifikasi risiko dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Arens (2018:37) adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi resiko dalam pencapaian sasaran. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan perintah manajemen telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta memastikan tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengatasi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepadakerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya kegagalan organisasi. Mengingat arti pentingnya, pengendalian hampir selalu disebutkan dalam setiap literature manajemen.

Mardiasmo (2018:98) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian meliputi :

- 1) Pemisahan fungsi/tugas/ wewenang yang cukup
- 2) Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
- 3) Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
- 4) Evaluasi secara independen atas kinerja
- 5) Pengendalian terhadap pemrosesan informasi, hal ini berkaitan dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan.

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen untuk mengidentifikasi resiko terhadap pencapaian tujuan yang akan dilakukan. Menurut Arens (2018:37) Indikatornya untuk variabel Aktivitas Pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Harus sesuai Prinsip Akuntansi;
- 2) Perekrutan dan Pengembangan SDM;
- 3) Tugas Prosedur dalam Pekerjaan;
- 4) Kesesuaian;
- 5) Pemisahan Tugas;
- 6) Independen.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya penting untuk ditampilkan sebagai referensi dan untuk mengetahui permasalahan yang dikaji oleh peneliti sebelumnya terkait dengan permasalahan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Ramadhani (2021) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif

dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara.

Jumardi (2021) dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan variabel transparansi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Secara simultan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Indraswarwati dan Manggala (2020) dengan judul Pengaruh Sistem akuntansi keuangan daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa faktor sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Faktor aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan aktivitas pengendalian sebesar 66,2% dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas keuangan, sedangkan sisanya sebesar 33,8% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain.

Penelitian Purba dan Amrul (2018) yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Penelitian Soleha (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Secara ringkas hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara (Ramadhani, 2021)	Penelitian kuantitatif dan regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara.	Menggunakan variabel yang sama yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data.	Variabel kejelasan sasaran. Sampel penelitian dan lokasi penelitian
2	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Jumardi, 2021)	Penelitian kuantitatif dan regresi linier berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan variabel transparansi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.	Menggunakan variabel yang sama yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data	Variabel transparansi publik. Sampel penelitian dan lokasi penelitian

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Pengaruh Sistem akuntansi keuangan daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar (Indraswarawati , 2020)	Penelitian kuantitatif dan regresi linier berganda	Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa faktor sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Faktor aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Gianyar.	Menggunakan variabel yang sama yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas,, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data	Sampel penelitian dan lokasi penelitian
4	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar (Purba dan Amrul, 2018).	Penelitian kuantitatif dan regresi linier berganda	Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.	Menggunakan variabel yang sama yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, dan akuntabilitas,, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data	Variabel transparansi publik. Sampel penelitian dan lokasi penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten (Soleha, 2017).	Penelitian kuantitatif dan regresi linier berganda	Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.	Menggunakan variabel yang sama yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas, Teknik analisis data dan Teknik pengumpulan data	Teknik analisis data, sampel dan lokasi

Sumber : Data diolah (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan daerah Dengan Akuntabilitas Keuangan

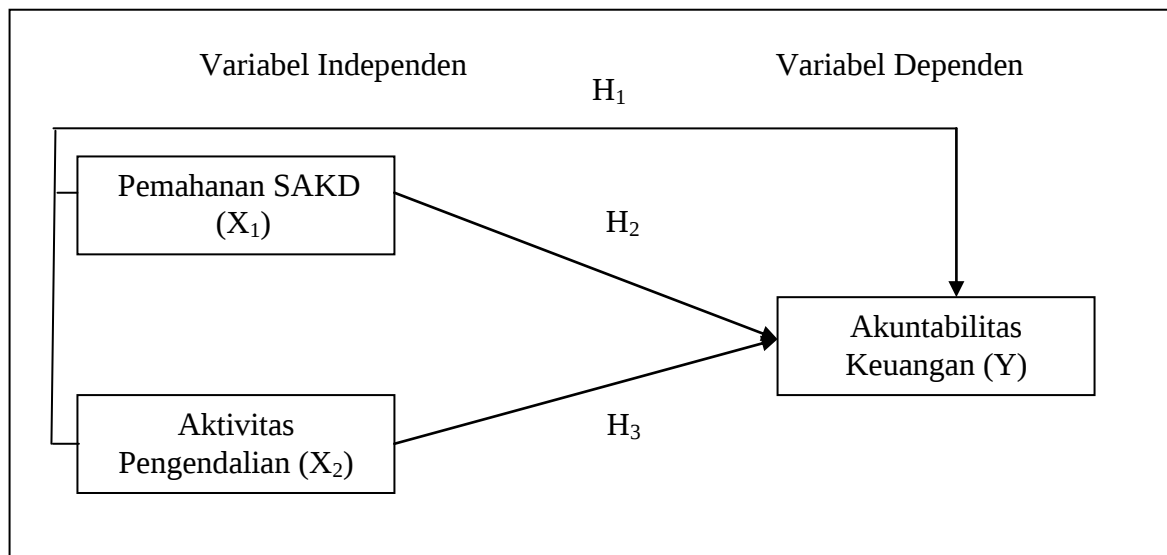
Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Hasil penelitian dari Purba dan Amrul (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntansi keuangan

2.3.2 Hubungan Aktivitas Pengendalian dengan Akuntabilitas Keuangan

Aktivitas pengendalian menolong meyakinkan bahwa pengarahan atasan instansi pemerintah dilakukan. Aktivitas pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Seorang auditor tidak hanya memiliki peran untuk menilai laporan keuangan klien, akan tetapi auditor harus dapat memberikan rekomendasi atas hasil kerjanya, seorang auditor juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengungkapkan kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan tersebut, tentunya harus berdasarkan pada bukti yang nyata, agar hasil kerja yang diperoleh auditor berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian dari Purba dan Amrul (2018) menyatakan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntansi keuangan. Kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah (2023)

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya (Arikunto, 2016). Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

H_2 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

H_3 : Aktivitas pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Penelitian ini mengacu pada rancangan dari Sekaran (2019:152) tersebut dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi, untuk masing-masing aspek dijelaskan yaitu sifat studi, jenis investasi, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis dan horizon waktu.

3.1.1 Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2019:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap variabel tidak bebas yaitu akuntansi keuangan.

3.1.2 Jenis Investigasi

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal.

Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran & Bougie, 2019:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh berpotensi dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah dan indepedensi.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti tidak ikut mempengaruhi kondisi akuntansi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Oleh karena itu, tingkat intervensi peneliti rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data berupa kuesioner yang telah diisi oleh auditor pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dan selanjutnya menganalisis data tersebut.

3.1.4 Situasi Studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan indepedensi terhadap akuntansi keuangan tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

3.1.5 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2019:73). Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan

Provinsi Aceh. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuesioner yang telah diisi oleh auditor Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh yang menjadi responden penelitian ini.

3.1.6 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross sectional*. Studi yang mengumpulkan data hanya sekali periode, baik harian, mingguan, maupun bulanan disebut studi dengan horizon waktu *one shot* atau *cross sectional* (Sekaran & Bougie, 2019:77). Horizon waktu dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut;

Tabel 3.1
Horison Waktu Penelitian

Tujuan	Jenis Penelitian	Unit Analisis	Time Horizon
T1	Kuantitatif	Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh	<i>Cross Sectional</i>
T2	Kuantitatif	Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh	<i>Cross Sectional</i>
T3	Kuantitatif	Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh	<i>Cross Sectional</i>

Sumber: Data diolah, 2023

3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2018:80). Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah 377 pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 79 pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Penentuan ukuran sampel ini dilakukan melalui teknik teori Slovin menurut Umar (2016:49) adalah sebagai berikut :

$$n =$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Proses kelonggaran 10%

$$n =$$

$$n =$$

$$n =$$

$$n =$$

$n = 79,04$ responden dan dibulatkan menjadi 79 responden

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 79 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk pengambilan data dilakukan dengan teknik *convenience sampling*. Teknik *convenience sampling* merupakan dimana peneliti berusaha menarik anggota populasi berdasarkan kemudahan ditemui atau ketersediaan anggota populasi tentu saja (Sugiyono, 2018:81). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Sampel
1	Kepala Bidang	1	-
2	Bagian Sekretariat	56	12
3	Bidang Pendapatan	32	8
4	Bidang Anggaran Aceh	22	5
5	Bidang Perbendaharaan	30	6
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh	28	6
7	Bidang Akuntansi	21	4
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran	18	3
9	UPTD	169	35
Jumlah		377	79

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, 2023

3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari organisasi atau individu yang diteliti, melalui pembagian kuisioner. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada responden di lokasi penelitian.

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan objek penelitian ini, penulis melakukan kegiatan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi responden (Arikunto, 2018). Dalam teknik kuisioner diminta untuk menyatakan tingkat persetujuan mengikuti skala pengukuran skala likert. Dalam skala likert, jawaban yang mendukung pertanyaan diberi skor berdasarkan jawaban masing-masing responden (Umar, 2017). Penentuan

nilai skala likert dengan menggunakan lima tingkatan jawaban yang dapat dilihat dari Tabel 3.2.

Tabel 3.3
Instrumen Skala Likert

No	Keterangan (Pilihan)	Skor
1	Sangat Setuju	1
2	Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	4
5	Sangat Tidak Setuju	5

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan 5 kategori pilihan agar tidak ada variasi diantara jawaban-jawaban yang disediakan.

3.2 Defenisi dan Operasional Variabel

Variabel operasional dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel *independent*, dan variabel *dependen* dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala	Item
Variabel Dependen					
1	Akuntabilitas keuangan (Y)	Sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan (Mulyadi, 2019:42)	1. Motivasi 2. Pengabdian pada profesi 3. Kewajiban sosial	Likert	A1-A3

Variabel Independen					
2	Sistem akuntansi keuangan daerah (X ₁)	suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset (Halim, 2018:94)	1. Pengidentifikasian 2. Pengukuran 3. Pencatatan 4. Pelaporan	Likert	B1-B4
3	Aktivitas pengendalian (X ₂)	Salah satu komponen etika tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen untuk mengidentifikasi resiko terhadap pencapaian tujuan yang akan dilakukan. (Arens et al, 2018:37).	1. Harus sesuai Prinsip Akuntansi; 2. Perekrutan dan Pengembangan SDM; 3. Tugas Prosedur dalam Pekerjaan; 4. Kesesuaian; 5. Pemisahan Tugas; 6. Independen.	Likert	C1-C6

3.3 Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan dan hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka metode analisis data yang dapat diterapkan adalah analisis regresi berganda. Dilihat dari jenis penelitian ini yang merupakan penelitian korelasi, metode analisis data dengan menerapkan analisis regresi berganda menjadi suatu pilihan yang patut digunakan.

Melalui analisis ini dapat dilihat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Dengan analisis regresi berganda maka dapat seberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel

terikat (Sarwono, 2017:158). Adapun persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y	= Akuntansi keuangan (Y)
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂	= Koefisien Regresi
X ₁	= Sistem akuntansi keuangan daerah
X ₂	= Aktivitas pengendalian
e	= <i>Standard error</i>

3.4 Pengujian Data

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji kuesioner yang dirancang layak atau tidak digunakan sebagai instrument penelitian. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur mencapai sasarannya. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar.

Realibilitas menunjukkan suatu tingkat keakurasian dan konsistensi dari suatu pengukurannya. Suatu instrumen dapat dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama dan diperoleh hasil yang tidak berbeda (Jogiyanto, 2017:120). Tempat untuk menguji validitas dan reabilitas tersebut adalah pelanggan/konsumen, diluar dari sampel penelitian. Uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan alat bantu program *software SPSS versi 23*.

3.4.1 Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur derajat ketetapan dalam penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Uji validitas akan dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antar item pertanyaan dengan

skor yang diperoleh dari hasil kuesioner, yaitu dengan mencari nilai koefisien korelasi (r) dari masing-masing pertanyaan dan dibandingkan nilai kritik tabel korelasi r (*product moment*).

Dalam uji validitas kriteria pengambilan keputusan adalah:

1. Jika r hitung $> r$ tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
2. Jika r hitung $< r$ tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan butir instrumen penelitian. Butir pertanyaan yang sudah dinyatakan valid dalam uji validitas akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika r alpha positif atau $> r$ tabel maka pernyataan reliabel.
2. Jika r alpha negatif atau $< r$ tabel maka pernyataan tidak reliabel.

Menurut Ghazali (2019:82) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah suatu kuesioner yang dirancang layak atau tidak digunakan sebagai instrument penelitian. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar.

Reliabilitas menunjukkan tingkat keakurasian dan konsistensi alat ukur. Instrumen dapat dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (Jogiyanto, 2017:120). Tempat untuk menguji validitas dan reliabilitas tersebut adalah individu, di luar sampel. Uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan *software SPSS* versi 23.

3.5 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan:

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variable bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable terikat (Sarwono, 2017:159).

1. Kriteria pengujian hipotesis secara simultan:

Jika $\beta_i (i = 1, 2) = 0$: artinya sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Jika $\beta_i (i = 1, 2) \neq 0$: artinya sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

2. Kriteria pengujian hipotesis secara parsial:

Kriteria pengujiannya adalah:

Jika $\beta_1 = 0$, artinya sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Jika $\beta_1 \neq 0$, artinya sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Jika $\beta_2 = 0$, artinya aktivitas pengendalian secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Jika $\beta_2 \neq 0$, artinya aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2019:95). Jika Koefisien Determinasi (R^2) semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y, dimana $0 < R^2 < 1$.

Sebaliknya, jika R^2 semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

Pada penelitian ini *R Square* yang digunakan adalah *R Square* yang sudah disesuaikan atau *Adjusted R Square* (*Adjusted R²*) dengan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab yang mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan Aceh, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Peraturan Gubernur Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 1 yaitu Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Aceh. Kemudian Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan kekayaan Aceh. Badan ini dipimpin

oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4.1.2 Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA
2. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
3. Pengendalian pelaksanaan APBA
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
5. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA
7. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
8. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
9. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh
10. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan aceh

11. Pelaksanaan penatausahaan asset Aceh; dan
12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Siklus LAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategik yang mendefinisikan visi, misi, tujuan, sasaran serta program Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, yang kemudian pada setiap tahunnya ditetapkan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. selanjutnya, pada setiap akhir periode pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Aceh. Struktur Organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Aceh membawahi Sekretariat; kemudian Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan. Kemudian di bawah sekretaris membawahi beberapa bidang yaitu bidang anggaran, bidang Anggaran Aceh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Sub Bidang Anggaran Badan Layanan Umum Daerah. Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Sub Bidang Belanja Langsung dan Sub Bidang Pembinaan Perbendaharaan. Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari, Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan.

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari Sub Bidang Wilayah I, Sub Bidang Wilayah II dan Sub Bidang Wilayah III. Kemudian Bidang Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Sub Bidang Penatausahaan Asset, Sub Bidang Legalitas dan Pengamanan Asset dan Sub Bidang Pemindahtanganan Asset. Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari Sub Bidang Pendapatan Asli Aceh Sub Bidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah dan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Aceh dapat dilihat pada lampiran 11.

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan masa kerja yang terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Usia		
	a. 21-25 Tahun	1	1,3
	b. 26-35 Tahun	11	13,9
	c. 36-45 Tahun	23	29,1
	d. 46-55 Tahun	19	24,1
	e. > 56 Tahun	25	31,6
Total		79	100,0
2	Jenis kelamin		
	a. Pria	51	64,6
	b. Wanita	28	35,4
Total		79	100,0
3	Status Perkawinan		
	a. Belum Menikah	7	8,9
	b. Menikah	72	91,1
Total		79	100,0
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. Diploma	8	10,1
	b. Sarjana	56	70,9
	c. Pasca Sarjana	15	19,0
Total		79	100,0
5	Gaji Pokok		
	a. Rp 2.100.000 – Rp 3.999.999	7	8,9
	b. Rp 4.000.000 – Rp 4.999.999	44	55,7
	c. Rp 5.000.000 – Rp 5.999.999	28	35,4
Total		79	100,0

Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang berusia antara 21 sampai dengan 25 tahun sebanyak 1 responden atau 1,3%, yang berusia antara 26 sampai dengan 35 tahun yaitu sebanyak 11 responden atau 13,9%, yang berusia antara 36 sampai dengan 45 tahun yaitu sebanyak 23 responden atau 29,1%, yang berusia di antara 45 sampai 55 tahun sebanyak 19 responden atau 24,1% dan yang berusia antara di atas 56 tahun yaitu sebanyak 25 responden atau 31,6%.

Mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 51 responden atau 64,6% dan responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 28 responden atau 35,4%. Kemudian karakteristik berdasarkan status perkawinan dapat dijelaskan dan yang sudah belum menikah sebanyak 7 responden atau 8,9% dan yang sudah menikah adalah sebanyak 72 responden atau 91,1%.

Karakteristik berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dijelaskan yang berpendidikan terakhir diploma yaitu sebanyak 8 responden atau 10,1%, yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 56 responden atau 70,9%, dan yang berpendidikan pasca sarjana sebanyak 15 responden atau 19,0%. Karakteristik berdasarkan gaji perbulan responden dapat dijelaskan bahwa sebanyak 7 responden atau 8,9% dengan dengan pendapatan sebesar Rp 2.100.000 – Rp 3.999.999, sebanyak 44 responden atau 55,7% dengan dengan pendapatan sebesar Rp 4.000.000 – Rp 4.999.999 dan sebanyak 28 responden atau 35,4% dengan dengan pendapatan sebesar Rp 5.000.000 – Rp 5.999.999.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara stastitik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficien of correlation* dengan bantuan SPSS. semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien kerelasi di atas dari nilai kritis kerelasi *produck moment* yaitu sebesar 0,227 sehingga semua pertanyaan yang terkandung

dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=79)	Keterangan
1	A1	Akuntabilitas Keuangan	0,857	0,227	Valid
2	A2		0,839		
3	A3		0,829		
4	B1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,821	0,227	Valid
5	B2		0,805		
6	B3		0,731		
7	B4		0,828		
8	C1	Aktivitas Pengendalian	0,836	0,227	Valid
9	C2		0,734		
10	C3		0,839		
11	C4		0,852		
12	C5		0,783		
13	C6		0,853		

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi di atas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,227, sehingga dapat disimpulkan pengujian dalam penelitian ini memiliki validitas. Atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Dan dinyatakan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian.

4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan *internal consistency* atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social*

Sciences (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS versi 23. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)

No	Variabel	Nilai Minimal Kehandalan	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	Akuntabilitas Keuangan (Y)	0,60	0,919	Handal
2.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁)	0,60	0,910	Handal
3.	Aktivitas Pengendalian (X ₂)	0,60	0,936	Handal

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat hasil uji reliabilitas dari nilai cronbach Alpha. Nilai *cronbach alpa reliabilitas* yang baik adalah yang makin mendekati 1, Reliabilitas yang kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,60 dapat diterima dan reliabilitas dengan *cronbach alpha* 0,80 atau di atasnya adalah baik. Dari hasil pengujian reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel akuntabilitas keuangan berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.4 Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengamati dua variabel bebas (*indenpendent variabel*) yaitu variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X₁), variabel aktivitas pengendalian (X₂)

dan juga mengamati satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu akuntabilitas keuangan (Y).

4.4.1 Variabel Akuntabilitas Keuangan

Penjelasan responden tentang variabel akuntabilitas keuangan pada dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Keuangan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Bapak/Ibu memiliki motivasi yang baik dalam meningkatkan kualitas audit sehingga memiliki dorongan untuk lebih teliti dalam pelaporan keuangan	0	0	3	3,8	17	21,5	42	53,2	17	21,5	3,92
2	Bapak/Ibu merasa senang dengan pengabdian pekerjaan yang sudah dilakukan	0	0	1	1,3	14	17,7	48	60,8	16	20,3	4,00
3	Mempublikasi hasil kerja aparatur merupakan kewajiban bagi Bapak/Ibu di dalam suatu instansi	0	0	2	2,5	10	12,7	52	65,8	15	19,0	4,01
Rerata												3,98

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas pada indikator pertama bahwa Bapak/Ibu memiliki motivasi yang baik dalam meningkatkan kualitas audit sehingga memiliki dorongan untuk lebih teliti dalam pelaporan keuangan diperoleh nilai rata-rata 3,92 yang berarti responden menyatakan setuju. Bapak/Ibu merasa senang dengan pengabdian pekerjaan yang sudah dilakukan diperoleh nilai rata-rata 4,00 yang

berarti responden menyatakan setuju. Mempublikasi hasil kerja aparatur merupakan kewajiban bagi Bapak/Ibu di dalam suatu instansi diperoleh nilai rata-rata 4,01 yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel akuntabilitas keuangan sebesar 3,98 artinya rata-rata responden menyatakan setuju dengan semua pernyataan yang ada pada kuisioner karena skala likert mendekati angka 4.

4.4.2 Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Penjelasan Responden Terhadap Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD mampu mengidentifikasi berbagai transaksi dengan tepat	5	6,3	0	0	3	3,8	51	64,6	20	25,3	4,03
2	Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dapat dilaksanakan dengan pengukuran efektif dan efisien	4	5,1	2	2,5	3	3,8	47	59,5	23	29,1	4,05
3	Pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan jujur agar masyarakat tetap percaya dengan aparatur pemerintah dibuktikan dengan berbagai pencatatan	5	6,3	1	1,3	2	2,5	55	69,6	16	20,3	3,96

Lanjutan Tabel 4.5

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
4	Adanya pelaporan keuangan yang transparansi, dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada aparatur	4	5,1	1	1,3	6	7,6	46	58,2	22	27,8	4,03
Rerata												4,02

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu Sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD mampu mengidentifikasi berbagai transaksi dengan tepat diperoleh nilai rata-rata 4,03 yang berarti responden menyatakan setuju. Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dapat dilaksanakan dengan pengukuran efektif dan efisien diperoleh nilai rata-rata 4,05 yang berarti responden menyatakan setuju. Pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan jujur agar masyarakat tetap percaya dengan aparatur pemerintah dibuktikan dengan berbagai pencatatan diperoleh nilai rata-rata 3,96 yang berarti responden menyatakan setuju. Adanya pelaporan keuangan yang transparansi, dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada aparatur diperoleh nilai rata-rata 4,03 yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 4,02 artinya rata-rata responden menyatakan setuju dengan semua pernyataan yang ada pada kuisisioner karena skala likert berada pada angka 4.

4.4.3 Variabel Aktivitas Pengendalian

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel aktivitas pengendalian dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Aktivitas Pengendalian

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar.	0	0	2	2,5	11	13,9	54	68,4	12	15,2	3,96
2	Kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan sumber daya manusia dan informasi teknologi	0	0	2	2,5	9	11,4	53	67,1	15	19,0	4,03
3	Personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing-masing seperti informasi teknologi.	1	1,3	2	2,5	10	12,7	52	65,8	14	17,7	3,96
4	Setiap transaksi pembelian terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan.	2	2,5	3	3,4	14	17,7	44	55,7	16	20,2	3,87
5	Hanya personel yang mempunyai orientasi yang diizinkan untuk menandatangani cek	1	1,3	3	3,8	11	13,9	47	59,5	17	21,5	3,96
6	Pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas.	1	1,3	3	3,8	9	11,4	51	64,6	15	19,0	3,96
Rerata												3,96

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu Pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar diperoleh nilai rata-rata 3,96 yang berarti responden menyatakan setuju. Kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan sumber daya manusia dan informasi teknologi diperoleh nilai rata-rata 4,03 yang berarti responden menyatakan setuju. Personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing-masing seperti informasi teknologi diperoleh nilai rata-rata 3,96 yang berarti responden menyatakan setuju. Setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan diperoleh nilai rata-rata 3,87 yang berarti responden menyatakan setuju. Hanya personel yang mempunyai orientasi yang diizinkan untuk menandatangani cek diperoleh nilai rata-rata 3,96 yang berarti responden menyatakan setuju. Pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas diperoleh nilai rata-rata 3,96 yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel aktivitas pengendalian sebesar 3,96 artinya rata-rata responden menyatakan setuju dengan semua pernyataan yang ada pada kuisioner karena skala likert mendekati angka 4.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis menyatakan bahwa faktor sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan aktivitas pengendalian (X_2) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Pengaruh Variabel Bebas terhadap Akuntabilitas keuangan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,195	,511		4,293	,000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	,291	,081	,375	3,588	,001
Aktivitas Pengendalian (X2)	,255	,083	,355	3,072	,008

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Akuntansi (Y)

Berdasarkan Tabel 4.7, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,195 + 0,291X_1 + 0,255X_2$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefisien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 2,195 artinya bila mana sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan aktivitas pengendalian (X_2), dianggap konstan, maka akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, adalah memiliki nilai 2,195 pada satuan skala likert.
- b. Koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) sebesar 0,291. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh sebesar

29,1% dengan asumsi variabel aktivitas pengendalian (X_2) dianggap konstan.

- c. Koefisien regresi aktivitas pengendalian (X_2) sebesar 0,255. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel aktivitas pengendalian secara relatif akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh sebesar 25,5% dengan asumsi variabel Sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dianggap konstan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa dari ke dua variabel yang diteliti ternyata variabel sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh dominan dalam meningkatkan Akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, karena diperoleh koefisien regresi sebesar 29,1%.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

4.6.1 Hasil Pengujian Secara Simultan dan Parsial

Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian dan aktivitas pengendalian secara simultan maupun secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Dalam uji simultan dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.7 dengan cara berikut:

1. Secara simultan

H_1 ; $\beta_1 = 0,291$, $\beta_2 = 0,255$, maka $\beta_1 \neq 0$, $\beta_2 \neq 0$, : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dan aktivitas pengendalian secara simultan

berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh

2. Secara parsial

H2 : $\beta_1 = 0,291$, $\beta_1 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh

H3 : $\beta_2 = 0,255$, $\beta_2 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

4.6.2 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,717 ^a	0,474	0,452	0,79278

a. Predictors: (Constant), Aktivitas pengendalian (X2), Sistem akuntansi keuangan daerah (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas keuangan (Y)

Berdasarkan dari output komputer di atas maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,717 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 71,7%. Artinya faktor sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan aktivitas pengendalian (X_2) mempunyai hubungan yang kuat terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,452 artinya bahwa sebesar 45,2% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan aktivitas pengendalian (X_2). Sedangkan selebihnya sebesar 54,8% dijelaskan oleh faktor variabel lain yaitu sumber daya manusia, budaya, sarana yang memadai dan lainnya.

4.6.3 Pembahasan

4.6.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Tabel 4.7, pengujian secara simultan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian bersama terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh yang baik. Pengendalian akuntansi akan membantu Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Hasil penelitian dari Syawalina et al., (2022) menyatakan bahwa dampak dari aktivitas pengendalian antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, mencegah penyalahgunaan dan kehilangan barang milik negara, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku dan meningkatkan kepercayaan dan reputasi organisasi dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Purba dan Amrul (2018) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Kemudian hasil penelitian dari Indraswarawati (2020) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

4.6.3.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 0,291 yang berarti sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai β_1 sebesar 0,291 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, dapat disimpulkan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan

pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja tidak hanya terpaku pada aspek finansial saja seperti yang sering kita ketahui, tetapi terdapat beberapa dimensi lainnya atau aspek dari akuntabilitas itu sendiri yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial (Syamsidar, et al., 2022)

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Beberapa dampak dari sistem akuntansi keuangan daerah antara lain meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Kemudahan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan, memungkinkan adanya integrasi antara berbagai modul atau bagian dalam sistem akuntansi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan yang akurat dan terkini pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Selain itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, memudahkan pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas keuangan organisasi dan meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Purba dan Amrul (2018) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Kemudian hasil penelitian dari Indraswarawati (2020) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

4.6.3.3 Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk aktivitas pengendalian adalah sebesar 0,255 yang berarti aktivitas pengendalian mempengaruhi akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai β_2 sebesar 0,255 dengan hasil perhitungan $\beta_2 \neq 0$, dapat disimpulkan aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Aktivitas pengendalian memiliki dampak yang baik terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Beberapa dampak positif dari aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh antara lain meningkatkan keandalan dan keakuratan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian memastikan adanya dokumentasi yang lengkap dan akurat terkait transaksi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan dan memperkuat pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.

Hal ini sejalan dengan sebelumnya yaitu dari Purba dan Amrul (2018) menyatakan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian dari Purba dan Amrul (2018) menyatakan aktivitas

pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Selanjutnya penelitian dari Indraswarawati (2020) menyatakan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Aktivitas pengendalian menolong meyakinkan bahwa pengarahan atasan instansi pemerintah dilakukan. Aktivitas pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Setiap instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan (Syamsidar, et al., 2018). Sehingga pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh sangat perlu melaksanakan penguatan pemahaman mengenai aktivitas pengendalian internal karena dengan aktivitas pengendalian yang baik maka akuntabilitas keuangan daerah dapat menjadi cepat dan tepat serta penyusunan laporan keuangan daerah dapat menjadi lebih akuntabel

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh yang baik.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak baik bagi Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh antara lain meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Kemudahan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan, memungkinkan adanya integrasi antara berbagai modul atau bagian dalam sistem akuntansi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan yang akurat dan terkini pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh.
3. Aktivitas pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. Hal disebabkan

aktivitas pengendalian pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh berdampak baik terhadap akuntabilitas keuangan antara lain meningkatkan keandalan dan keakuratan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas misalnya pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan jujur agar masyarakat tetap percaya dengan aparatur pemerintah dibuktikan dengan berbagai pencatatan.
2. Disarankan pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh dapat mengadakan pelatihan kerja kepada pegawai misalnya pada bagian akuntansi atau pelaporan keuangan yang sesuai pekerjaan pegawai agar kompetensi pegawai semakin meningkat.
3. Disarankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh agar dapat mempublikasi aktivitas pengendalian sesuai dengan prosedur misalnya setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan.

4. Penelitian berikutnya diharapkan agar memperluas populasi penelitian dan menambah variabel lain karena masih banyak faktor-faktor lain yang mendukung kualitas pehasil kerja aparatur seperti kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal dan pengalaman aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. (2017). Pengaruh Pengetahuan Audit, Aktivitas pengendalian Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit Investigasi Pada auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika Volume 1 Nomor 3*.
- Arens, Alvin A. (2018). *Auditing & Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga
- Arikunto, Suharsimi, (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. (2019). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Defitri, Siska Yulia. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita Vol. 3, No. 1, Hal 64-75*
- Ghartey (2019) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. (2019). *Aplikasi Multivariate Dengan SPSS*, Semarang: Universitas Dipanegoro.
- Halim dan Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Herawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *STAR-Study & Accounting Research, XI(1), 1–14*.
- <https://bpka.acehprov.go.id>
- Indraswarwati, S. A., dan Manggala, I. P. (2020). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Widya Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 1-16.
- Jumardi. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 1-15.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.

Mulyadi. (2019). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

Permendagri No. 13. Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*).

PP No. 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Purba, R. B., dan Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol . 18, No. 2, 140 - 152

Rahayu, S. K. & Ely, S. (2017). *Auditing*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ramadhani, F. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 1-17.

Romney, B. M. dan Paul, J. S. (2019). *Accounting Information System*. Jakarta : Salemba Empat.

Sekaran, U dan Bougie. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba.

Soleha, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Jurnal Etikonomi* Vol. 13, No. 1, 1-14.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Supranto, J. (2017). *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah untuk Menyusun Skripsi, Tesis*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Syamsidar., Mulyadi, AR., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 2 (2), 95-101.

- Syamsidar,. Gadeng, T., & Chairunnisas, P. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Badan Kepegawaian Negara Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 12 (1), 1-16.
- Syawalina, C. F., Elviza., & Susanti, E. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Barang Milik Negara Pada Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, Vol. 12 No. 2, 183-194.
- Umar, Husein. (2017). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang *keuangan Negara*.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.

KUESIONER PENELITIAN

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk penulisan karya akhir yang bersifat ilmiah sebagai persyaratan tugas akhir pada Universitas Muhammadiyah Aceh, yang difokuskan pada bidang akuntansi

Identitas Responden

1. Usia :
 - (1). 21-25 tahun
 - (2). 26-35 tahun
 - (3). 36-45 tahun
 - (4). 46-55 tahun
 - (5). > 56 tahun
2. Jenis Kelamin :
 - (1). Pria
 - (2). Wanita
3. Status Perkawinan :
 - (1). Belum Menikah
 - (2). Menikah
 - (3). Pernah Menikah
4. Pendidikan Terakhir :
 - (1). SMU
 - (2). Diploma
 - (3). Sarjana (S1)
 - (4). Pasca Sarjana (S2)
5. Gaji Pokok Perbulan
 - (1). < Rp 2.000.000
 - (2). Rp 2.100.000 – Rp 3.999.999
 - (3). Rp 4.000.000 – Rp 4.999.999
 - (4). Rp 5.000.000 – Rp 5.999.999
 - (5). > Rp 6.000.000

Daftar Pertanyaan

Petunjuk Pengisian: Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu dengan kategori jawaban SS = Sangat Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju, S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

A. Akuntabilitas Keuangan (Y)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Bapak/Ibu memiliki motivasi yang baik dalam meningkatkan kualitas audit sehingga memiliki dorongan untuk lebih teliti dalam pelaporan keuangan					
2	Bapak/Ibu merasa senang dengan pengabdian pekerjaan yang sudah dilakukan					
3	Mempublikasi hasil kerja auditor merupakan kewajiban bagi Bapak/Ibu di dalam suatu instansi					

B. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD mampu mengidentifikasian berbagai transaksi dengan tepat					
2	Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dapat dilaksanakan dengan pengukuran efektif dan efisien					
3	Pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan jujur agar masyarakat tetap percaya dengan aparatur pemerintah dibuktikan dengan berbagai pencatatan					
4	Adanya pelaporan keuangan yang transparansi, dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada aparatur					

E. Aktivitas Pengendalian (X₂)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar.					
2	Kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan sumber daya manusia dan informasi teknologi					

3	Personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing-masing seperti informasi teknologi.					
4	Setiap transaksi pembelian terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan.					
5	Hanya personel yang mempunyai orientasi yang diizinkan untuk menandatangani cek					
6	Pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas.					

Lampiran 2 Tabulasi Data Jawaban Kuisisioner

NO	Identitas					Indikator			Y	Indikator				X2	Indikator						X2
	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	A1	A2	A3		B1	B2	B3	B4		C1	C2	C3	C4	C5	C6	
1	5	2	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
2	3	1	1	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
3	3	2	2	3	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	3	4	3	4	3,67
4	4	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	3	4	4	3,83
5	3	1	2	4	4	4	4	4	4,00	5	5	4	4	4,50	4	4	5	5	5	5	4,67
6	5	1	2	3	2	5	4	4	4,33	4	4	5	5	4,50	3	4	4	3	4	4	3,67
7	4	1	2	3	4	3	4	4	3,67	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
8	5	1	2	4	3	5	4	5	4,67	5	4	4	5	4,50	3	3	4	4	4	4	3,67
9	3	2	2	3	4	4	4	4	4,00	3	2	4	2	2,75	5	5	5	5	5	5	5,00
10	5	1	2	3	3	5	5	5	5,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
11	2	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
12	3	1	2	4	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	3	4	4	3,83
13	5	1	2	3	4	3	4	4	3,67	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
14	3	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	3	4	4	3,83
15	4	2	2	3	3	5	4	4	4,33	5	5	4	5	4,75	4	4	4	4	4	4	4,00
16	5	1	2	4	2	4	4	4	4,00	3	4	1	3	2,75	4	4	4	4	4	4	4,00
17	3	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
18	2	1	2	3	4	3	3	3	3,00	4	3	2	5	3,50	5	5	5	5	5	5	5,00
19	4	1	1	3	3	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5	5,00
20	2	2	1	3	3	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5	5,00
21	5	2	2	3	4	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5	5,00
22	2	1	2	3	3	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	3	4	3	3	4	3	3,33
23	5	1	2	2	4	3	3	4	3,33	4	5	4	3	4,00	4	4	4	2	2	3	3,17
24	5	1	2	4	3	4	4	4	4,00	4	4	4	5	4,25	5	5	5	5	5	5	5,00
25	3	2	2	4	3	5	5	5	5,00	4	5	5	5	4,75	4	4	4	4	4	4	4,00
26	4	1	2	3	3	4	4	4	4,00	5	5	4	4	4,50	5	5	5	5	5	5	5,00
27	2	1	2	3	3	5	5	4	4,67	4	5	5	5	4,75	5	5	5	4	5	3	4,50
28	3	1	2	3	3	4	4	5	4,33	4	4	1	4	3,25	4	4	4	4	4	4	4,00
29	4	2	2	3	2	4	4	4	4,00	4	5	4	4	4,25	4	4	4	4	5	5	4,33
30	4	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	5	4	4	4,25	4	4	4	4	4	4	4,00
31	4	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
32	5	1	2	3	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
33	5	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	3	3,75	3	3	4	5	4	4	3,83
34	3	1	1	3	3	4	4	4	4,00	4	4	5	4	4,25	4	4	4	4	4	4	4,00
35	3	2	2	3	4	3	3	4	3,33	5	5	4	4	4,50	4	4	4	4	4	4	4,00
36	4	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	3	4	3,75	2	2	3	2	2	2	2,17
37	3	1	2	4	4	2	2	2	2,00	1	1	1	1	1,00	4	4	4	4	4	4	4,00
38	5	1	2	3	4	4	4	4	4,00	1	4	4	4	3,25	4	4	4	4	4	4	4,00
39	4	2	2	3	4	4	4	4	4,00	1	1	1	1	1,00	4	5	4	5	4	4	4,33
40	5	2	2	4	3	5	5	5	5,00	4	4	4	4	4,00	4	3	4	4	3	4	3,67
41	3	2	2	3	4	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
42	5	1	2	3	3	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4,25	4	4	4	4	4	4	4,00
43	2	1	2	3	4	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	2	2	2	2	2	2	2,00
44	3	1	2	4	4	4	5	4	4,33	1	1	1	1	1,00	4	4	4	4	4	4	4,00
45	5	2	2	3	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5	5	5,00
46	3	2	2	3	3	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4	4	4	4,00
47	4	2	2	3	3	3	4	4	3,67	4	4	4	3	3,75	5	5	5	5	5	5	5,00
48	5	1	2	4	2	5	5	4	4,67	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5	5,00
49	3	1	2	3	3	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	4	5	4	5	4	5	4,50
50	2	1	2	2	4	4	5	4	4,33	4	5	4	4	4,25	4	5	4	4	5	5	4,50
51	4	1	1	3	3	5	4	5	4,67	3	4	4	5	4,00	3	3	3	3	4	4	3,33
52	2	2	1	2	4	3	4	4	3,67	4	4	4	4	4,00	3	3	3	3	3	4	3,17
53	5	2	2	3	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5	5,00

54	2	1	2	3	3	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4	4	4	4,00
55	5	1	2	2	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
56	5	1	2	4	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
57	3	2	2	4	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	3	4	4	3	3	4	3,50
58	4	1	2	3	3	4	3	4	3,67	4	3	4	3	3,50	4	4	4	4	4	4	4,00
59	2	1	2	2	3	3	4	3	3,33	5	5	4	4	4,50	4	4	4	4	4	4	4,00
60	3	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
61	4	2	2	2	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	3	4	2	1	1	1	2,00
62	4	1	2	2	3	2	3	2	2,33	4	1	4	4	3,25	4	4	4	4	4	4	4,00
63	4	1	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
64	5	2	2	3	2	5	5	4	4,67	4	4	4	4	4,00	3	4	1	1	5	2	2,67
65	5	2	2	3	3	2	3	3	2,67	1	2	3	1	1,75	4	4	4	4	4	4	4,00
66	1	1	1	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	3	3	3,67
67	3	2	2	3	4	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	4	4	3	3	3	3	3,33
68	4	1	2	3	3	3	3	3	3,00	5	4	4	5	4,50	4	3	3	4	4	4	3,67
69	3	1	2	4	4	4	4	4	4,00	4	3	4	3	3,50	3	3	3	3	3	3	3,00
70	5	1	2	3	2	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
71	4	2	2	3	4	4	5	5	4,67	4	4	4	4	4,00	4	4	4	3	3	3	3,50
72	5	2	2	4	3	3	3	3	3,00	5	5	5	5	5,00	4	3	4	3	3	3	3,33
73	3	2	2	3	4	3	3	3	3,00	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4	4	4	4,00
74	5	1	2	3	3	3	3	4	3,33	4	4	4	4	4,00	4	4	3	3	3	4	3,50
75	2	1	2	2	4	3	4	4	3,67	4	4	4	4	4,00	4	4	5	5	5	4	4,50
76	3	1	2	4	2	4	4	5	4,33	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
77	5	2	2	3	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4	4	4	4,00
78	3	2	2	3	3	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
79	4	2	2	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	5	4,25	3	3	3	3	3	3	3,00

Lampiran 3 Persentase Identitas Responden

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-25 tahun	1	1,3	1,3	1,3
	26-35 tahun	11	13,9	13,9	15,2
	36-45 tahun	23	29,1	29,1	44,3
	46-55 tahun	19	24,1	24,1	68,4
	> 56 tahun	25	31,6	31,6	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	51	64,6	64,6	64,6
	Wanita	28	35,4	35,4	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Status Perkawinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Menikah	7	8,9	8,9	8,9
	Menikah	72	91,1	91,1	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma	8	10,1	10,1	10,1
	Sarjana	56	70,9	70,9	81,0
	Pasaca Sarjana	15	19,0	19,0	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Pendapatan Rata-Rata Perbulan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp 2.100.000 – Rp 3.999.999	7	8,9	8,9	8,9
	Rp 4.000.000 – Rp 4.999.999	44	55,7	55,7	64,6
	Rp 5.000.000 – Rp 5.999.999	28	35,4	35,4	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Lampiran 4 Frequencies Akuntabilitas Keuangan (Y)

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	3,8	3,8	3,8
	Kurang Setuju	17	21,5	21,5	25,3
	Setuju	42	53,2	53,2	78,5
	Sangat Setuju	17	21,5	21,5	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Kurang Setuju	14	17,7	17,7	19,0
	Setuju	48	60,8	60,8	79,7
	Sangat Setuju	16	20,3	20,3	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2,5	2,5	2,5
	Kurang Setuju	10	12,7	12,7	15,2
	Setuju	52	65,8	65,8	81,0
	Sangat Setuju	15	19,0	19,0	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Lampiran 5 Frequencies Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁)

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	6,3	6,3	6,3
	Kurang Setuju	3	3,8	3,8	10,1
	Setuju	51	64,6	64,6	74,7
	Sangat Setuju	20	25,3	25,3	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	5,1	5,1	5,1
	Tidak Setuju	2	2,5	2,5	7,6
	Kurang Setuju	3	3,8	3,8	11,4
	Setuju	47	59,5	59,5	70,9
	Sangat Setuju	23	29,1	29,1	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	6,3	6,3	6,3
	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	7,6
	Kurang Setuju	2	2,5	2,5	10,1
	Setuju	55	69,6	69,6	79,7
	Sangat Setuju	16	20,3	20,3	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	5,1	5,1	5,1
	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	6,3
	Kurang Setuju	6	7,6	7,6	13,9
	Setuju	46	58,2	58,2	72,2
	Sangat Setuju	22	27,8	27,8	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Lampiran 6 Frequencies Aktivitas Pengendalian (X₂)

C1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	2,5	2,5	2,5
Kurang Setuju	11	13,9	13,9	16,5
Setuju	54	68,4	68,4	84,8
Sangat Setuju	12	15,2	15,2	100,0
Total	79	100,0	100,0	

C2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	2,5	2,5	2,5
Kurang Setuju	9	11,4	11,4	13,9
Setuju	53	67,1	67,1	81,0
Sangat Setuju	15	19,0	19,0	100,0
Total	79	100,0	100,0	

C3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
Tidak Setuju	2	2,5	2,5	3,8
Kurang Setuju	10	12,7	12,7	16,5
Setuju	52	65,8	65,8	82,3
Sangat Setuju	14	17,7	17,7	100,0
Total	79	100,0	100,0	

C4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	2,5	2,5	2,5
Tidak Setuju	3	3,8	3,8	6,3
Kurang Setuju	14	17,7	17,7	24,1
Setuju	44	55,7	55,7	79,7
Sangat Setuju	16	20,3	20,3	100,0
Total	79	100,0	100,0	

C5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
Tidak Setuju	3	3,8	3,8	5,1
Kurang Setuju	11	13,9	13,9	19,0
Setuju	47	59,5	59,5	78,5
Sangat Setuju	17	21,5	21,5	100,0
Total	79	100,0	100,0	

C6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Tidak Setuju	3	3,8	3,8	5,1
	Kurang Setuju	9	11,4	11,4	16,5
	Setuju	51	64,6	64,6	81,0
	Sangat Setuju	15	19,0	19,0	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Lampiran 7 Reliability & Validitas Akuntabilitas Keuangan (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,919	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3,92	,764	79
A2	4,00	,660	79
A3	4,01	,650	79

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	8,01	1,525	,857	,874
A2	7,94	1,804	,839	,884
A3	7,92	1,840	,829	,892

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11,94	3,727	1,930	3

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	96,895	78	1,242	1,810	,167
Within People	,363	2	,181		
Between Items	15,637	156	,100		
Residual	16,000	158	,101		
Total	112,895	236	,478		

Grand Mean = 3,98

Lampiran 8 Reliability & Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,910	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	4,03	,933	79
B2	4,05	,946	79
B3	3,96	,926	79
B4	4,03	,933	79

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	12,04	6,293	,821	,875
B2	12,01	6,295	,805	,880
B3	12,10	6,656	,731	,906
B4	12,04	6,268	,828	,872

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
16,06	11,009	3,318	4

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	214,671	78	2,752		
Within People					
Between Items	,339	3	,113	,456	,713
Residual	57,911	234	,247		
Total	58,250	237	,246		
Total	272,921	315	,866		

Grand Mean = 4,02

Lampiran 9 Reliability & Validitas Aktivitas Pengendalian (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,936	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3,96	,629	79
C2	4,03	,640	79
C3	3,96	,724	79
C4	3,87	,868	79
C5	3,96	,792	79
C6	3,96	,759	79

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	19,78	11,043	,836	,923
C2	19,72	11,357	,734	,934
C3	19,78	10,479	,839	,921
C4	19,87	9,599	,852	,920
C5	19,78	10,325	,783	,928
C6	19,78	10,222	,853	,919

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
23,75	14,935	3,865	6

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	194,156	78	2,489	1,166	,325
Within People Between Items	,928	5	,186		
Residual	62,072	390	,159		
Total	63,000	395	,159		
Total	257,156	473	,544		

Grand Mean = 3,96

Lampiran 10 Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Aktivitas Pengendalian (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,717 ^a	,474	,452	,79278

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,613	2	4,806	13,694	,000 ^b
	Residual	26,706	76	,351		
	Total	36,319	78			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Coefficients^a

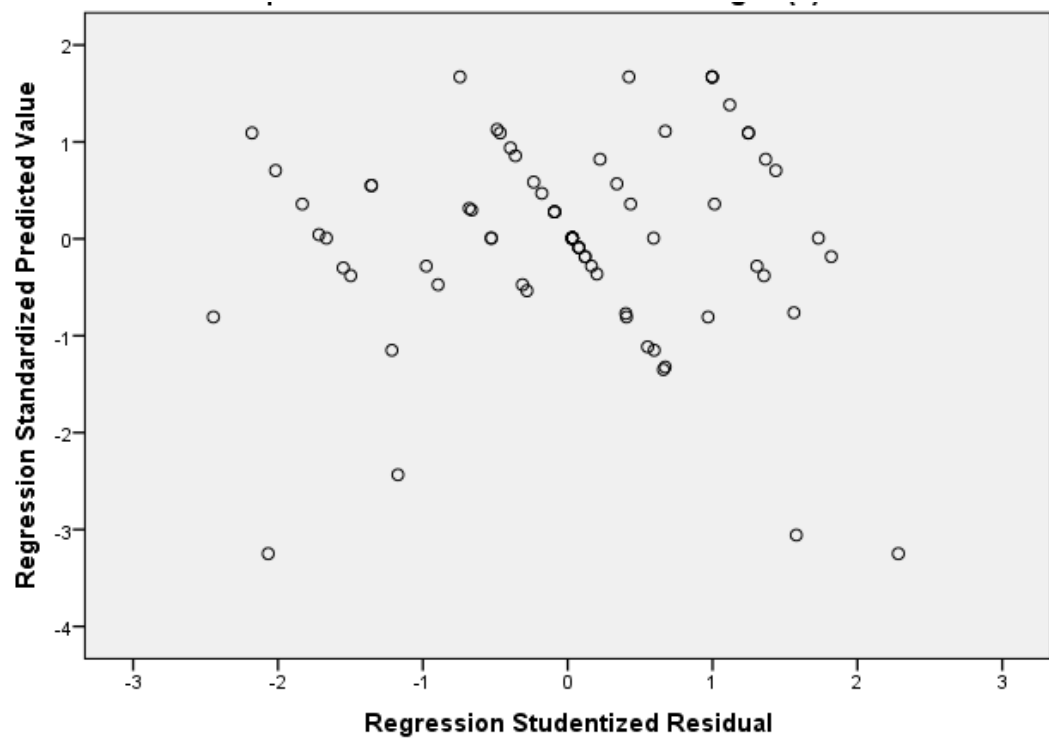
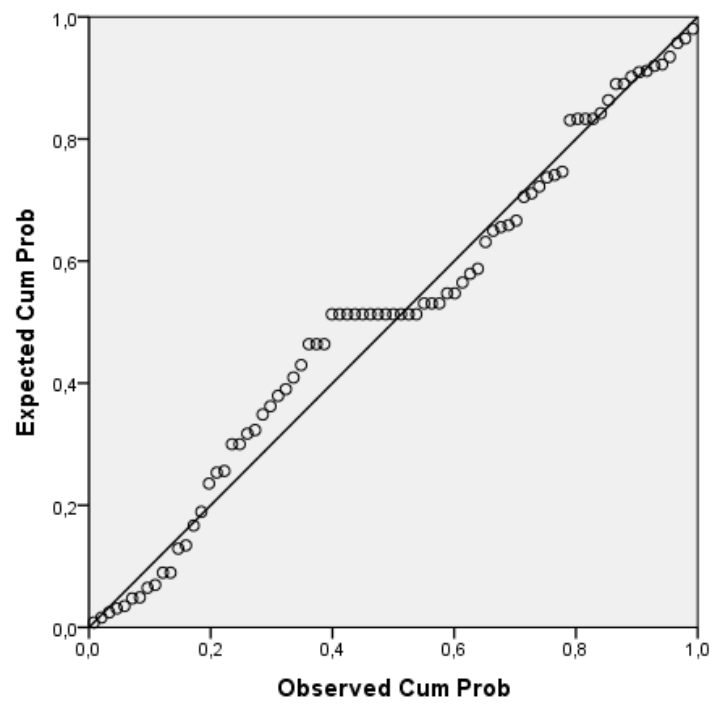
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,195	,511		4,293	,000
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	,291	,081	,375	3,588	,001
	Aktivitas Pengendalian (X2)	,255	,083	,355	3,072	,008

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan (Y)

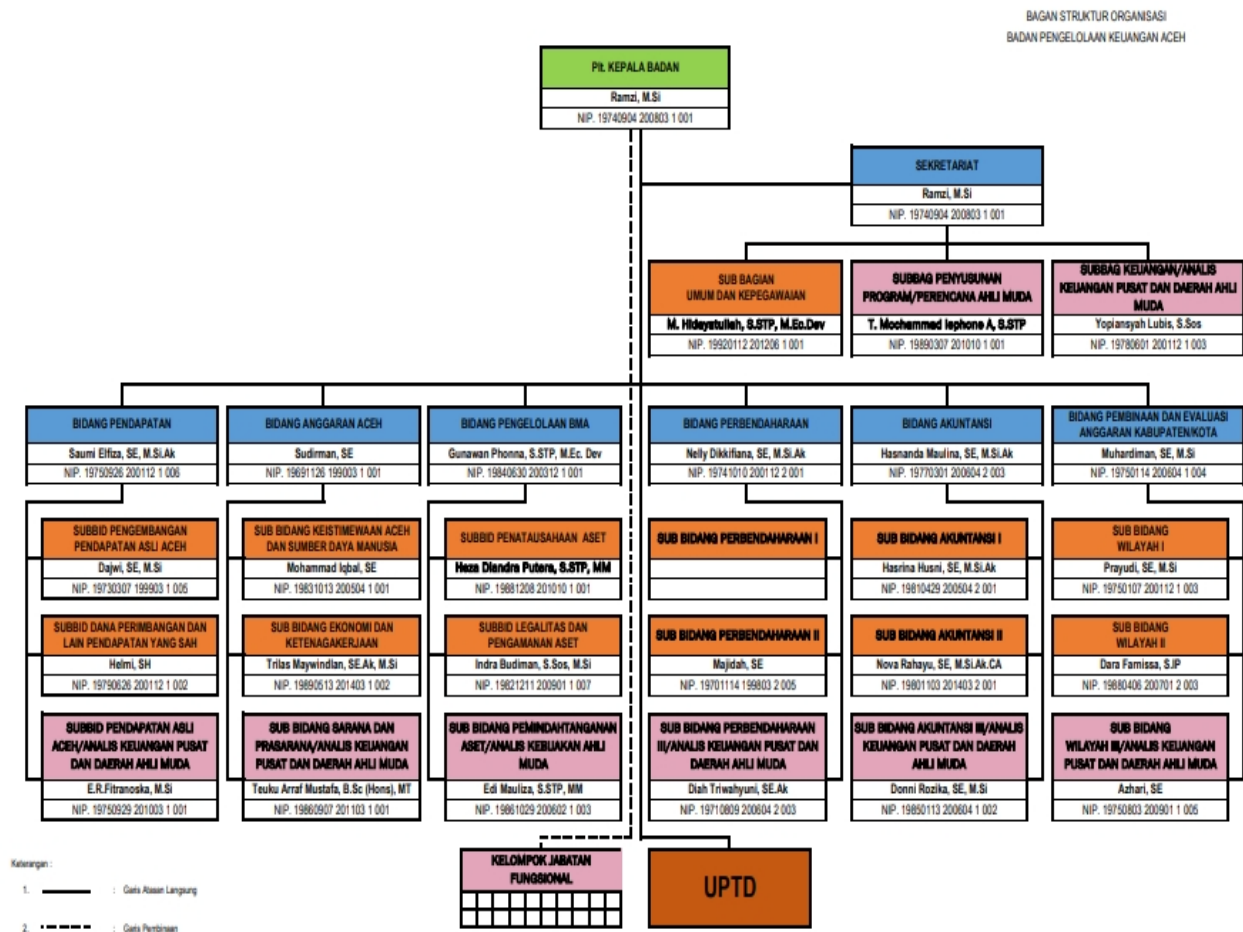
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	,994	1,006
	Aktivitas Pengendalian (X2)	,994	1,006

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan (Y)



Lampiran 11 Struktur Organisasi BPKA



Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	73	0,235
7	0,754	31	0,355	77-79	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90-95	0,207
11	0,602	35	0,334	96	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,194
13	0,553	37	0,325	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,355	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,254		
26	0,388	50	0,279		

Note: n = Jumlah Sampel